

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Latar Belakang

Dua puluh satu tahun setelah reformasi 1998 berlalu, terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat terealisasi dengan baik

Alih-alih memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggara negara, anggota legislatif dan pihak-pihak lain

Para penyelenggara negara dengan modus dan cara yang lebih sistematis dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara

B. Definisi Korupsi



Definisi Korupsi menurut Beberapa Ahli

- o **David M. Chalmers:**

Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (*financial manipulations and decision injurious to the economy are often libeled corrupt*).

- o **J.J. Senturia:**

Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi (*the misuse of public power for private profit*).

Definisi Korupsi menurut Beberapa Ahli



Extortion



Bribery

- **Syed Husein Alatas:**
Tindakan yang meliputi penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.
- **Transparency International:**
Penyalahgunaan kekuasaan (*a misuse of power*), kekuasaan yang dipercayakan (*a power that is entrusted*), dan keuntungan pribadi (*a private benefit*) baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya.

Teori Perilaku Korupsi

TEORI *MEANS-ENDS SCHEME* : Robert Merton.

→ menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.

Teori Perilaku Korupsi

TEORI SOLIDARITAS SOSIAL

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917).

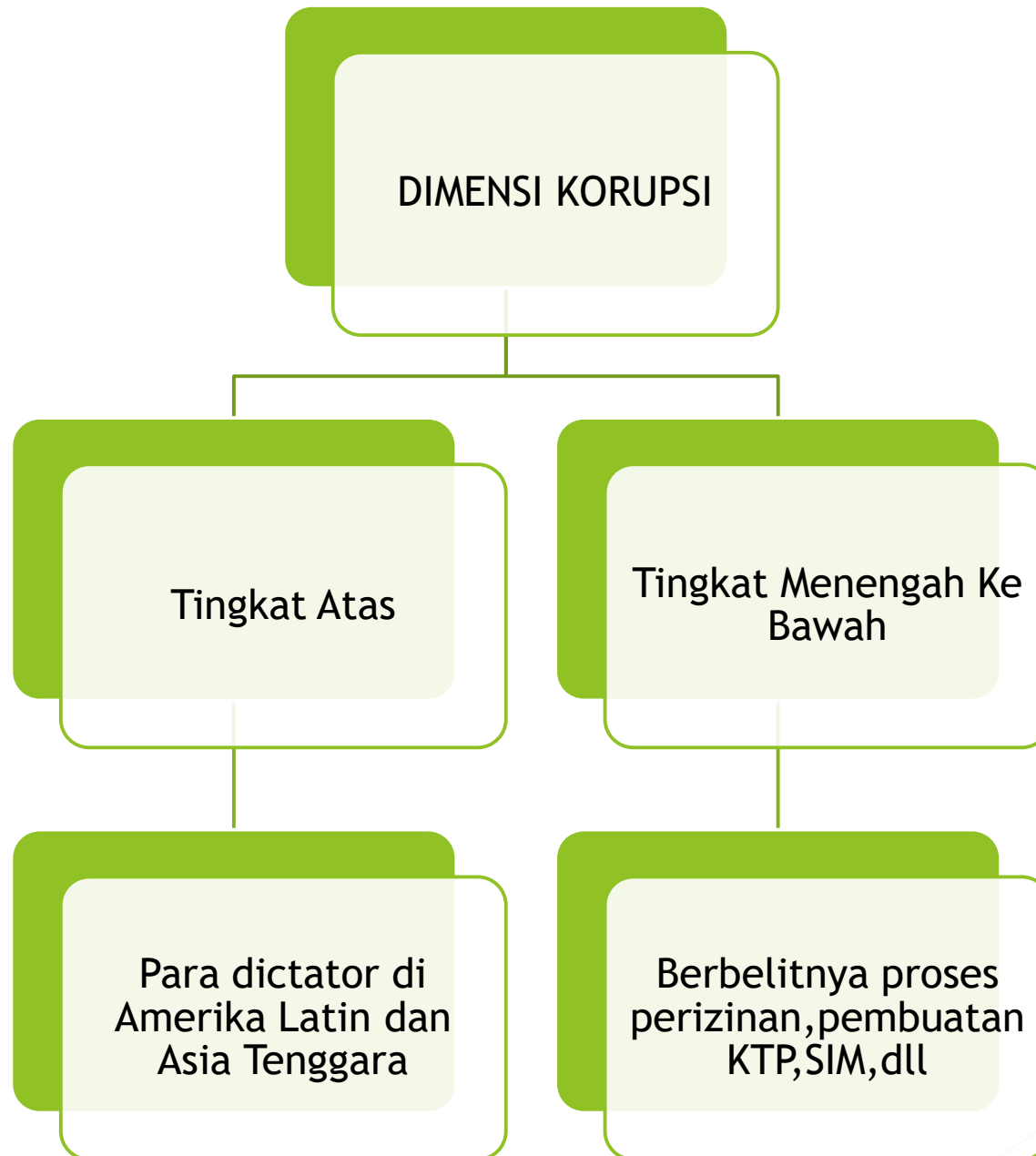
Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya

Teori Perilaku Korupsi

GONE THEORY

Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi, dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE.

Ilustrasi *GONE Theory* terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi ***Greeds*** (keserakahan), ***Opportunities*** (kesempatan), ***Needs*** (kebutuhan) dan ***Exposure*** (pengungkapan).



C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Faktor Internal :

1. Aspek Perilaku Individu

- Sifat tamak manusia
- Moral yang kurang kuat menghadapi godaan
- Gaya hidup konsumtif
- Tidak mau (malas) bekerja keras

2. Aspek sosial

Faktor Eksternal :

1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

2. Aspek ekonomi

3. Aspek politik

4. Aspek organisasi

D. DAMPAK KORUPSI

Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro :

1. Menurunnya kualitas taraf hidup rakyat
2. Sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi
3. Meningkatnya pola pengeluaran masyarakat
4. Tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk
5. Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri

Dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro :

1. Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional
2. Semakin tinggi tingkat inflasi
3. Semakin rendahnya kinerja investasi nasional
4. Nilai tukar mata uang rupiah merosot
5. Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional



DAMPAK KORUPSI



**perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak**

E. HAMBATAN PENANGGAPAN KORUPSI

Hambatan Struktural



Bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan

Hambatan Cultural



Bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat

Hambatan Instrumental



Bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan

Hambatan Manajemen



Bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik

**EMPAT AKAR HALANGAN
BESAR PEMBERANTASAN
KORUPSI**

OPPORTUNITY,terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi

SYSTEM,saat sistem pengawasan tidak ketat,orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang

NEED,sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak pernah usai

EXPOSES,berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah

F. PEMBERANTASAN KORUPSI

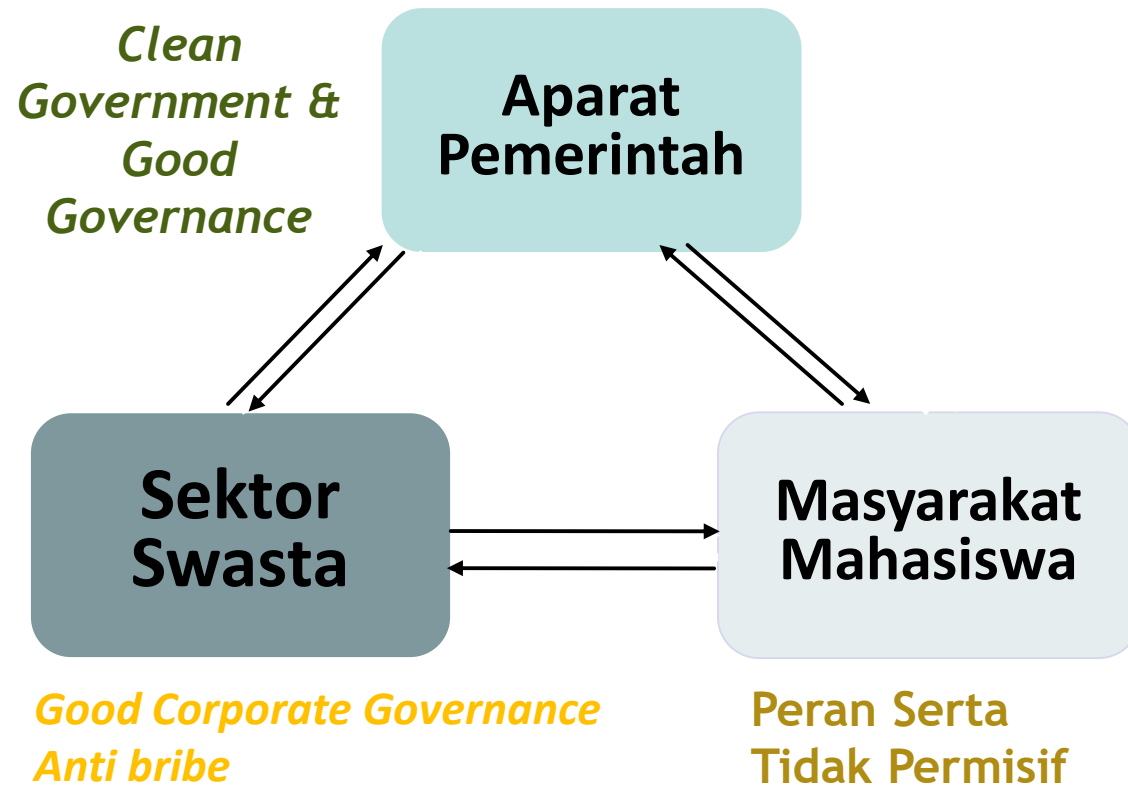
- Pemberantasan korupsi terdiri dari Penindakan dan Pencegahan.
- Upaya Pemberantasan Korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan.

G. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

H. SUBJEK PEMBERANTASAN KORUPSI



PP 71 Th. 2000:

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

I. ANTI KORUPSI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Anti Korupsi :

Semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi

Pendidikan Anti Korupsi:

Upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi

DESAIN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENDIDIKAN KARAKTER

Agama, Pancasila, UUD 1945,
UU No. 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Teori
Pendidikan,
Psikologi,
Nilai, Sosial
Budaya

Nilai-nilai Luhur :

Nilai-
Nilai Anti
Korupsi

*Pengalaman terbaik
(best practices) dan
praktik nyata*

PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN



PERANGKAT PENDUKUNG
Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya,
Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Kebersamaan, Komitmen
Pemangku Kepentingan

**Perilaku
Berkarakter**

Perilaku
Anti
Korupsi

► Pentingnya Pendidikan Anti-korupsi

Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa:

- memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya
- menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya.



Dapat dicapai melalui pendidikan

MENGAPA PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI ?

PENDEKATAN YANG DIPAKAI

Pendekatan HUKUM

- Penegakan hukum, aturan hukum, aparat hukum
- Berdampak cepat , biaya tinggi
- Tapi masalah justru muncul dari aparat hukum

Pendekatan BISNIS

- Mengadakan kompetisi sehat dalam kinerja dengan hadiah insentif bagi karyawan - sehingga orang tidak perlu korupsi

Pendekatan PASAR

- Menciptakan kompetisi antar penyedia barang-jasa sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya

TAPI MENGAPA KASUS-KASUS KORUPSI TERUS TERUNGKAP, KORUPTOR-KORUPTOR BARU TERUS LAHIR ??

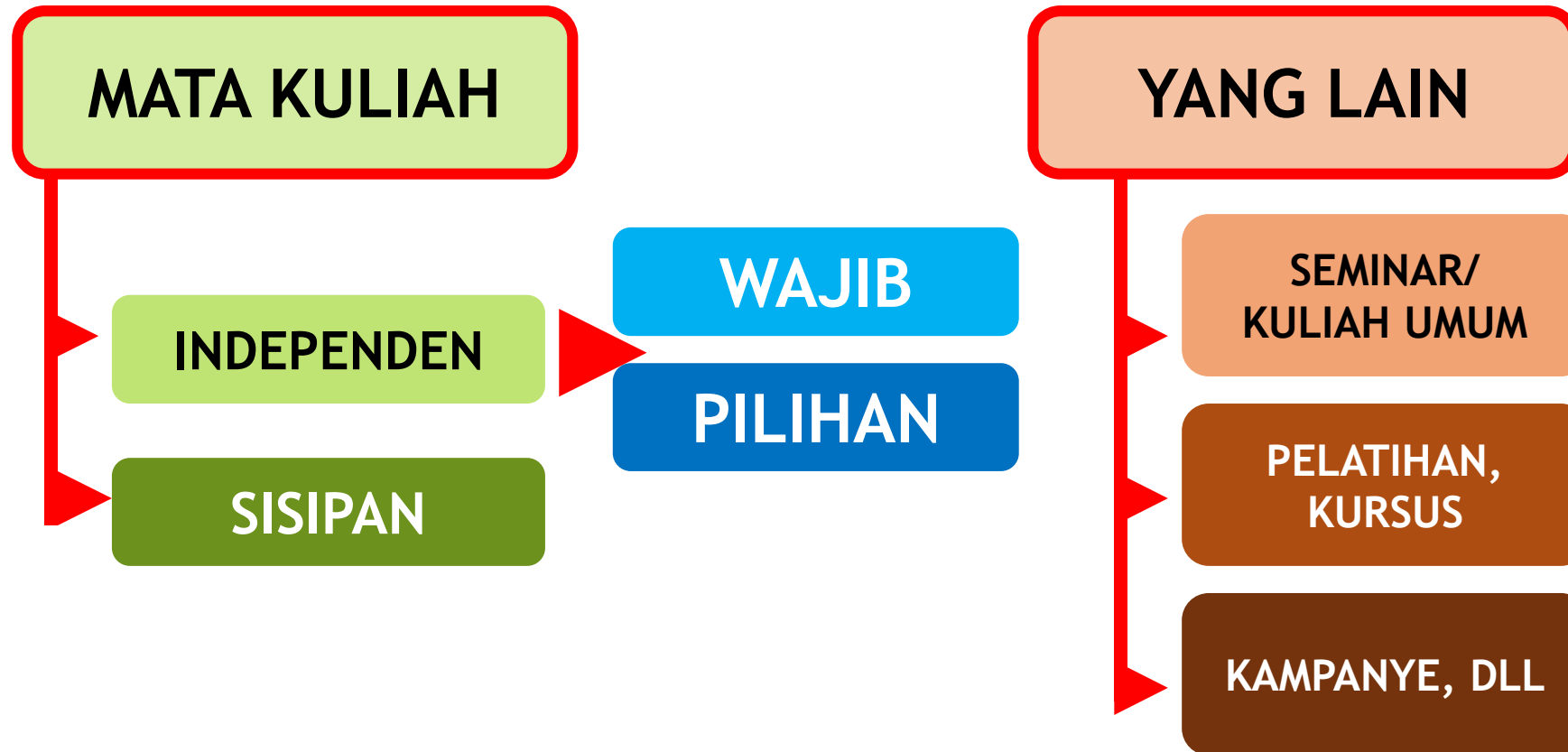
KARENA UPAYA DENGAN KETIGA PENDEKATAN SEBELUMNYA BELUM MAKSIMAL MAKA PERLU DIDAMPINGI DENGAN UPAYA PENDEKATAN BUDAYA

PENDEKATAN BUDAYA

- Membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui *pendidikan*
- Cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya,
- Biaya tidak besar (*low costly*), namun
- Hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

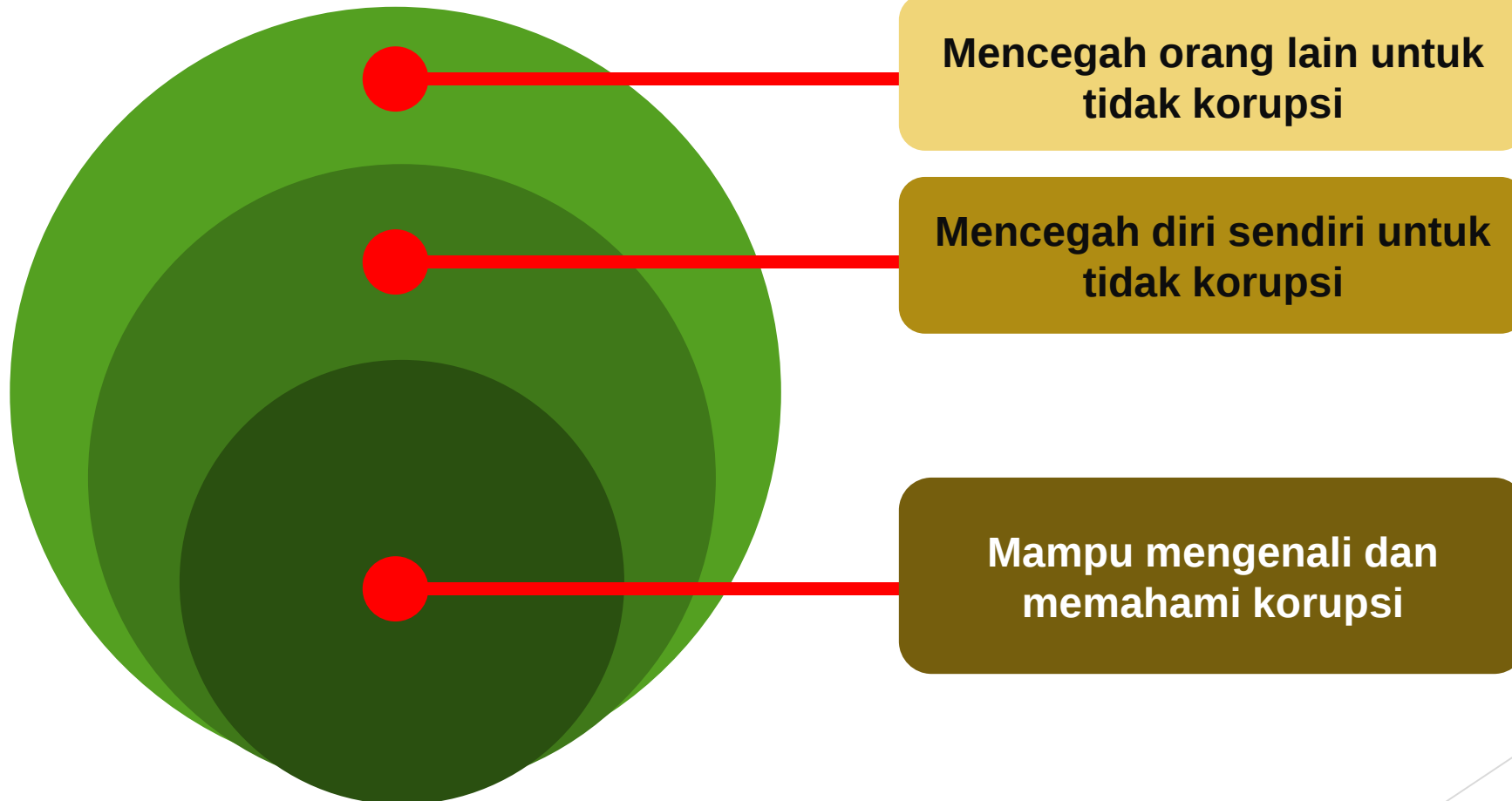
PENDIDIKAN : PENDEKATAN BUDAYA dalam MENCEGAH KORUPSI

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI...

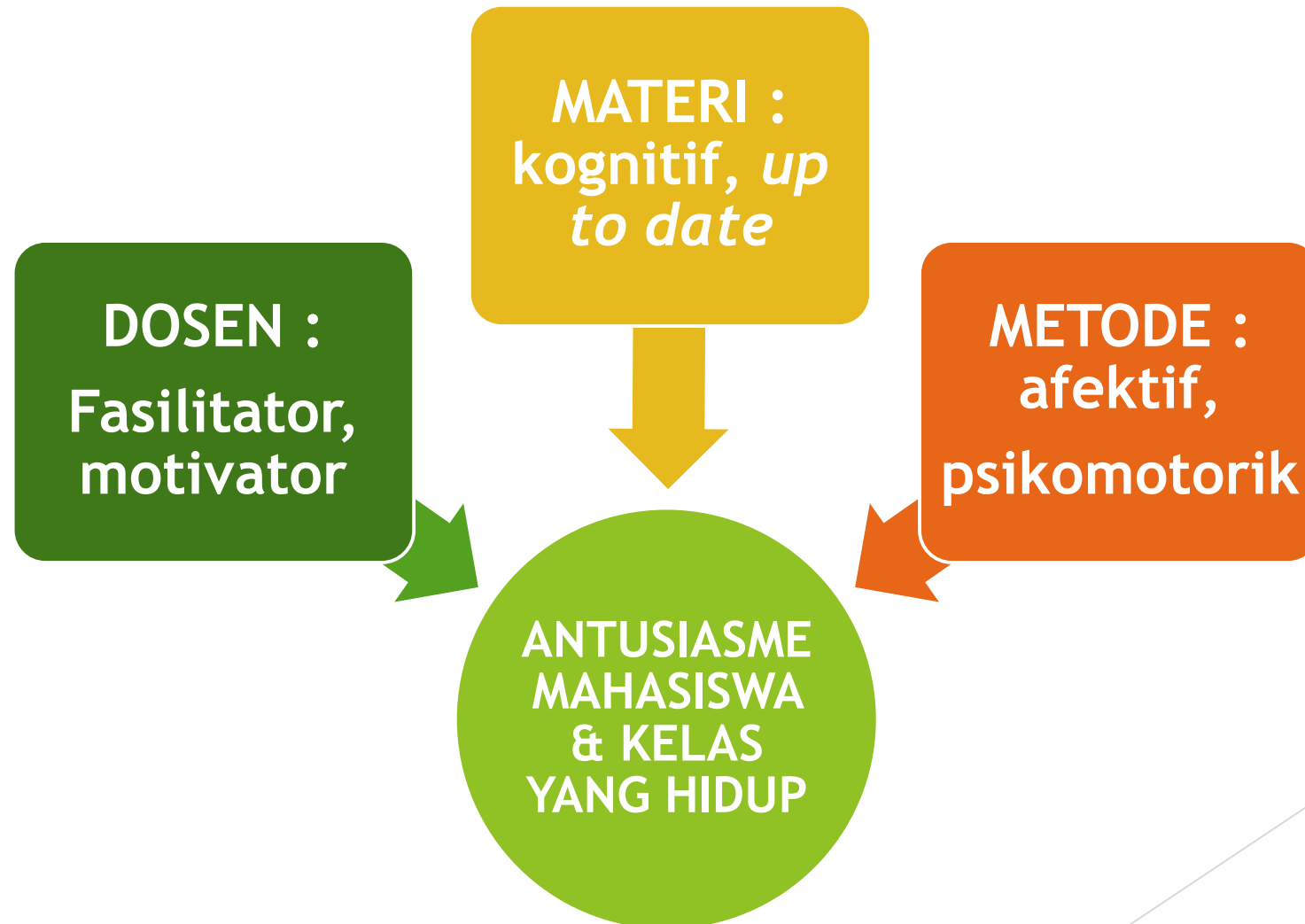


TUJUAN : membangun karakter anti-korupsi.

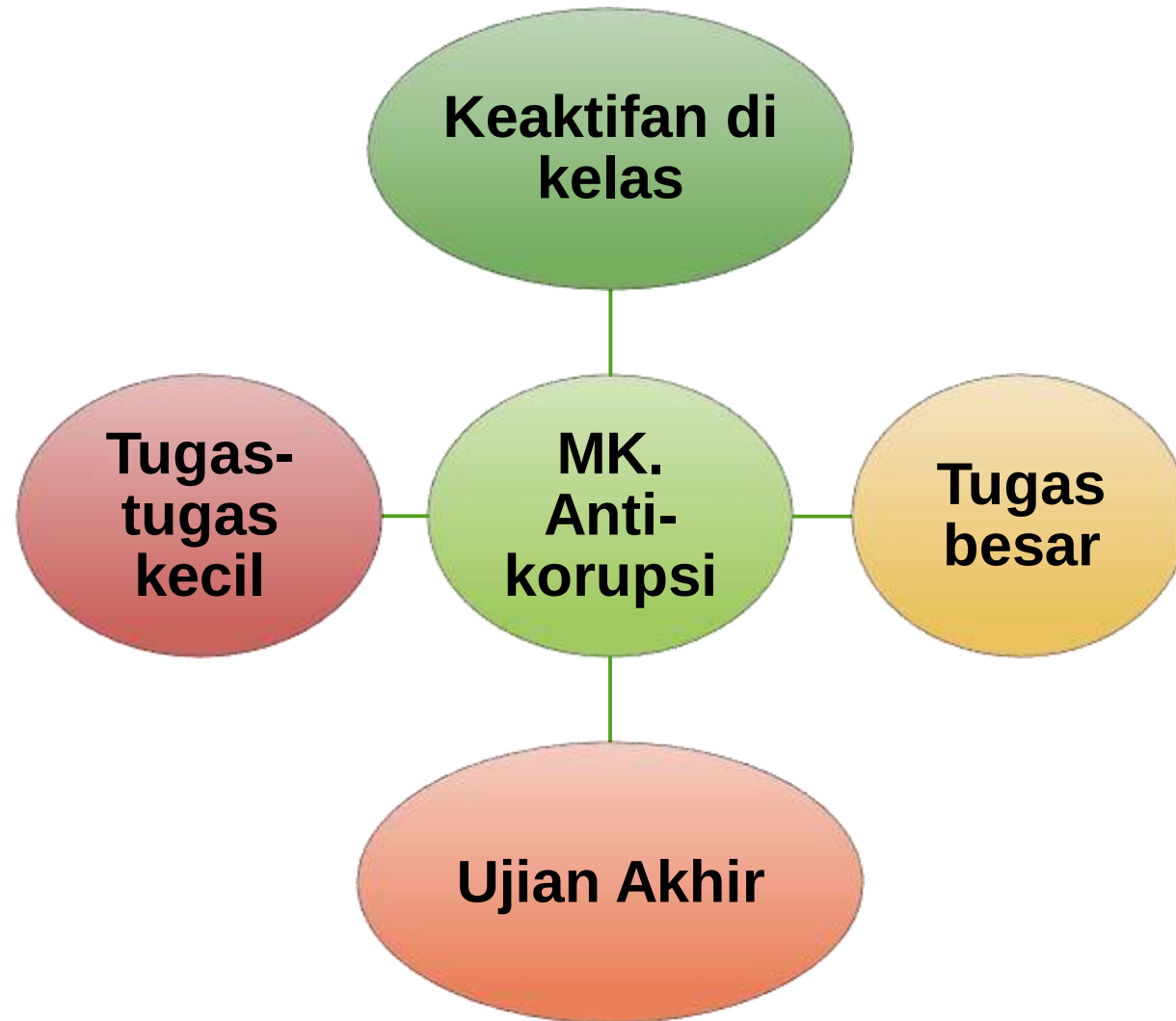
kompetensi Mahasiswa :



TANTANGAN : mendesain mata kuliah anti-korupsi yang menarik



MENGUKUR KARAKTER



▶ Peran Warga Masyarakat Membangun Komunitas Anti-korupsi





Program pendidikan Anti-korupsi

PAK di Beberapa Perguruan Tinggi

- Materi anti-korupsi telah diajarkan di beberapa PT (contoh : MK Sosiologi Korupsi)
- MoU KPK dengan beberapa PT sejak tahun 2006 (UNIKA Soegijapranata, UNNES, dll)
- Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mahasiswa PPKn UNNES
- Universitas Paramadina, matakuliah wajib sejak 2008.
- ITB, matakuliah pilihan, sejak 2009.
- Beberapa PT menyisipkan materi PAK ke dalam matakuliah tertentu.
- Beberapa PT telah melakukan PAK dalam bentuk sosialisasi / kampanye / seminar.

► Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi



► Kuliah Umum Anti Korupsi

Well-known figure is important, not only because of the knowledge they could share, but they also attract media to come and cover the program





Program Pendidikan Anti-korupsi

VISI

Terwujudnya Sarjana Indonesia Berkarakter Bersih Korupsi

MISI

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
- Melakukan PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI

▶ Tujuan Mata Kuliah Pendidikan Anti-korupsi

- Membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan:
 - Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya
 - Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
- Menyiapkan mahasiswa sebagai ***agent of change*** bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.

▶ Standar Kompetensi

1. Mahasiswa mampu mengenali dan memahami korupsi (*individual competence*).
2. Mahasiswa mampu mencegah diri sendiri agar tidak melakukan korupsi.
3. Mahasiswa mampu mencegah orang lain untuk tidak melakukan korupsi.

▶ **Bentuk Perkuliahan Pendidikan Anti-korupsi**

- Penyampaian materi oleh dosen
- Kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi
- Pemutaran film dan diskusi
- Tugas (disesuaikan dengan kekhasan Perguruan Tinggi)
- Observasi / Karya tulis / Karya teknologi

▶ Materi Dasar Pendidikan Anti-korupsi

1. Pengertian Korupsi
2. Faktor Penyebab Korupsi
3. Dampak Masif Korupsi
4. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
5. Upaya Pemberantasan Korupsi
6. Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi
7. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia
8. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi

NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI



9 Nilai Antikorupsi Menurut KPK

Nilai	Contoh Indikator
Jujur	• Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten), • Tidak melakukan perbuatan curang, • Tidak berbohong, • Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
Disiplin	• Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
Tanggung Jawab	• Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
Kerja Keras	• Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, • Tenghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
Sederhana	• Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
Mandiri	• Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, • Tidak menyuruh-menyuru atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
Adil	• Selalu menghargai perbedaan, • Tidak pilih kasih
Berani	• Berani jujur, • Berani menolak ajakan untuk berbuat curang, • Berani melaporkan adanya kecurangan, • Berani mengakui kesalahan
Peduli	• Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, • Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama

PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI

AKUNTABILITAS



TRANSPARANSI



KEWAJARAN/FAIRNESS



KEBIJAKAN



KONTROL KEBIJAKAN



Akuntabilitas

- Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja
- Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.
- Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan.
- Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Transparansi

- Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
- Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
- Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*).

Kewajaran/fairness

- ✓ Prinsip *fairness* ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya.



Kebijakan

- Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
- Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.

3 model kontrol kebijakan :

- **Partisipasi:**
Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.
- **Oposisi:**
Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak.
- **Revolusi;**
Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai



PERAN MAHASISWA

- Pemberantasan korupsi (terutama Pencegahan) perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk mahasiswa.
- Mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi



Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi

1. Menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif.



2. Membangun dan memelihara gerakan anti korupsi.



▶ Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi





PENCEGAHAN

Pendidikan Anti Korupsi

- Mewajibkan Pemimpin Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Anti Korupsi
- Mendorong adanya Pendidikan Anti Korupsi di Kampus
- Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
- Adanya Materi Pendidikan Anti-Korupsi di Kaderisasi Mahasiswa

Kampanye Ujian Bersih

- Pembuatan Media Proraganda (Baliho, Spanduk, dan Poster)
- Pembuatan Media On-line untuk mengkampanyekan Ujian Bersih
- Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian Bersih di Kaderisasi Mahasiswa

CONTOH PENCEGAHAN



▶ OPINI



Gagasan / Ide

- Memperbanyak opini mengenai kasus korupsi ke media
- Membuat Bunga Rampai (buku) mengenai Anti-Korupsi
- Membuat audiovisual interaktif terkait anti-korupsi

Metode Pencegahan Korupsi

- Gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
- Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat Universitas
- Adanya Tata Etika dan Norma diantara Mahasiswa

Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional

- Mahasiswa diharapkan dapat lebih peka dan siaga menanggapi isu Korupsi lokal yang terjadi

- Advokasi dan Pengawasan Penyusunan Anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah / nasional
- Gerakan moral untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi
- Sebagai kelompok penyeimbang bagi gerakan yang mendukung koruptor
- Mendorong Penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan

THANK YOU